

MODEL KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI SAYAP PARTAI

Ridho Ferdian¹, Robi Cahyadi Kurniawan², R. Sigit Krisbiantoro³ & Himawan Indrajat⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

Jalan Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajasaba, Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi: robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id

Received: 20/01/2020 | Revised: 18/03/2020 | Accepted: 19/03/2020

Abstract

The purpose of this study was to determine the regeneration model carried out by the Gerindra Party, NasDem, PKS through the wing. This research uses qualitative research methods with the principle of regeneration issued by the Komisi Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Commission). The result of this research is that Gerindra and NasDem parties have implemented an open, non-closed / discriminatory and tiered cadre pattern. Both parties in recruiting cadres have no certain limit, all have the same opportunity to receive training to become qualified cadres. PKS does not adhere to an open system and uses a closed / discriminatory principle, this party recruits candidate members who have religious values and uphold Islamic values but still carry out a tiered cadre model.

Keywords: recruiting cadres, open system, closed system, tiered system

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra, NasDem, PKS melalui sayap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan prinsip kaderisasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil dari penelitian ini adalah Partai Gerindra dan NasDem telah melakukan pola kaderisasi terbuka, tidak tertutup/diskriminatif serta berjenjang, kedua partai tersebut dalam merekrut kader tidak ada batas-batas tertentu semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pelatihan menjadi kader yang mumpuni. PKS tidak menganut sistem terbuka dan menggunakan prinsip tertutup/diskriminatif, partai ini merekrut calon-calon anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami namun tetap melakukan model kaderisasi berjenjang.

Kata kunci: rekrutmen kader, sistem terbuka, sistem tertutup, sistem berjenjang

PENDAHULUAN

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena dengan demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum. Di negara yang menganut demokrasi terutama di Indonesia menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili melihat masyarakat Indonesia yang sangat pluralitas dengan berbagai ragam suku, kebudayaan, adat istiadat, serta kepercayaan.

Tujuannya agar wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan mencerminkan ragam dukungan yang ada di masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Dengan demikian, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, tujuan dari kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kekuasaan, serta mempertahankan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008). Partai politik merupakan penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan yang diperintah. Partai politik dibentuk sebenarnya untuk melaksanakan demokrasi di suatu negara karena partai politik sebagai sarana warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperjuangkan kepentingannya untuk kelompoknya. Ada dua peran utama partai politik, pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi

partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008).

Semakin optimal partai politik melaksanakan peran dan fungsinya, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Partai politik harus mengamalkan demokrasi dengan memberi stimuli para kadernya agar memberikan yang terbaik pada Negara dan bangsa yang pada hakekatnya membangun mentalitas juara untuk memenangkan setiap kompetisi dengan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya (Subiyanto, 2014).

Demi terwujudnya suatu demokrasi yang baik partai politik harus mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, unggul, kuat serta solid melalui proses rekrutmen dan kaderisasi politik, karena melalui kader partai yang akan maju dalam proses pemilu sebagai wakil rakyat. Partai politik haruslah berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, dengan mendudukkan kader-kadernya menjadi pejabat pemerintah sbagai wakil rakyat, sehingga dapat turut serta dalam mengambil dan menentukan keputusan politik berupa kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik.

Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, pada fungsi ini seseorang mengalami proses politik yaitu menyeleksi, menjaring dan melatih calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi dan mengemban amanat dari masyarakat. Dan menjadi pemimpin yang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat. Rekrutmen atau kaderisasi ini bisa dilakukan dengan dua model,

Dengan mempunyai kader-kader politik yang berkualitas, partai politik tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berkompentensi sebagai calon pemimpin politik di pemerintahan serta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintah sebagai pemimpin yang baik dan amanah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka dari itu setiap partai politik pasti mempunyai pola atau sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemikiran dan ideologi politik yang dianut masing-masing partai politik.

Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai politik dimulai dari penerimaan anggota, penyeleksian kader, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/ penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Kaderisasi belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Selama masa orde baru hingga era reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur, ketenaran bahkan dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum.

Pengakuan dan jaminan ini merupakan wujud pentingnya keberadaan organisasi sayap bagi setiap partai politik yang bukan sekedar pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi. Keberadaan organisasi sayap diharapkan dapat berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya pengkaderan yang merupakan salah satu instrument bagi Partai Politik, kehadiran kader bisa untuk mendongkrak, maupun sekedar mempertahankan elektabilitasnya.

Pemberdayaan organisasi sayap partai politik, seharusnya menjadi keharusan karena dari situlah seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Penguatan kader yang militan, mampu bersaing secara kapasitas intelektual dan memiliki visi yang jelas sesuai dengan platform partai politik.

Organisasi sayap partai politik sangat berperan penting sebagai pintu utama masuk dan menjadikan pilar utama kaderisasi, dan penguatan kader, maka secara otomatis proses seleksi kader untuk duduk sebagai legislatif maupun eksekutif akan lebih mengedepankan kualitas intelektual, serta basis massa pendukung. Kaderisasi partai politik melalui sayap partai merupakan proses

dimana setiap kader yang akan menjadi anggota partai politik diwajibkan memahami tentang visi-misi partai, platform partai, tujuan dari partai politik. Sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (10), fungsi organisasi sayap partai politik yaitu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi, membimbing dan mendampingi serta memberikan advokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya.

Partai politik memiliki sayap partai yang berbeda-beda misalnya partai nasionalis lebih mengedepankan sayap partai yang mampu menjaring para petani, buruh sedangkan partai agama akan mengedepankan sayap partai bergerak dalam berdakwah, sesuai dengan hak partai politik mendirikan sayap partai yang mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat, hal ini tentu mempengaruhi model kaderisasi dari setiap partai politik. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan (Syamsudin, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas tulisan ini hendak menggambarkan model kaderisasi partai politik melalui sayap partai, melihat situasi pada saat ini banyak partai politik yang memilih kader secara instan inilah yang akan menimbulkan partai untuk memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas dalam pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Peneliti tertarik mengambil penelitian kaderisasi melalui sayap partai terutama sayap partai sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi partai politik tentu kadernya lebih memahami tentang visi, misi, dan ideologi partai politik itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan prinsip kaderisasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pertama, terbuka, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kedua, tertutup/ diskriminatif yaitu tidak adanya pemberian akses yang berbeda dalam proses kaderisasi. Ketiga, berjenjang, artinya penjurusan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan. Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.

Keberadaan organisasi sayap bagi partai politik adalah suatu hak yang legal sejak terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaannya diharapkan bukan sekedar pemenuhan hak undang-undang dan pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung peran dan fungsi partai politik. Untuk itu banyak partai dalam hal penguatan mesin politiknya tersebut membentuk organisasi diluar partai yang bersifat penjawantahan dari partai atau *underbow* partai.

Organisasi *underbow* atau organisasi sayap partai ini diharapkan dapat mempertahankan eksistensi partai dan menjamin berjalannya roda partai. Organisasi sayap diharapkan akan bekerja sendiri dalam kaderisasi anggotanya yang hasil pengkaderannya akan didayagunakan oleh partai induk. Keberadaan organisasi sayap bagi setiap partai politik diharapkan bukan sekedar pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi sebagai pendukung partai

politik menjalankan fungsi dan tujuannya. Pembentukan kaderisasi melalui sayap partai ini efektif untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Dalam perannya sebagai rekrutmen politik organisasi sayap merekrut individu-individu untuk bergabung dalam sayap partai guna menghasilkan kader mumpuni yang mampu mewujudkan cita-cita partai. Maka dari itu rekrutmen dan kaderisasi politik menjadi hal yang harus diperhatikan demi bertahan dan berjalannya roda kepartaian.

Keberadaan organisasi sayap diharapkan melahirkan kader - kader mumpuni untuk dilibatkan dalam perpolitikan partai. Kaderisasi yang dilakukan oleh Organisasi Sayap Partai Gerindra dalam menciptakan kader-kadernya yang dipersiapkan untuk duduk dalam jabatan politik dilaksanakan secara informal karena usaha-usaha untuk mempersiapkan seorang calon pemimpin atau pejabat politik tidak secara berencana, teratur, tertib, sistematis, terarah dan disengaja serta tidak menggunakan kurikulum tertentu.

Gerindra Masa Depan (GMD)

Partai Gerindra melakukan kaderisasi melalui sayap partainya dengan membentuk Gerindra Masa Depan (GMD) dengan tujuan membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Organisasi sayap partai memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perekrutannya, GMD menggunakan model kaderisasi terbuka, non diskriminatif, serta berjenjang. Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

- a. Model Kaderisasi Terbuka. Berdasarkan model kaderisasi terbuka, setiap anggota partai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan kader agar bisa menjadi kader yang dapat membangun partai dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi partai Gerindra itu sendiri.
- b. Model Kaderisasi Non-Diskriminatif. Berdasarkan model non diskriminatif dalam perekrutan kader maupun anggota sayap partai, Partai Gerindra telah berupaya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk ikut dalam dunia politik, tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, maupun etnis selama kader atau anggota sayap partai tersebut memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia serta tidak bertentangan dengan ideologi.
- c. Model Kaderisasi Berjenjang. Berdasarkan model kaderisasi berjenjang, dalam perekrutan kader maupun anggota partai di Partai Gerindra, dimulai dari tingkat dasar, di mana pada tingkat tersebut, para kader pemula diberikan pelatihan dan pendidikan politik.

Garda Pemuda NasDem

Garda Pemuda Nasdem (GP Nasdem) adalah organisasi kepemudaan resmi Nasional Demokrat yang mengusung visi sebagaimana tertuang dalam Manifesto Nasional Demokrat yang mengemban misi Restorasi Indonesia. GP Nasdem terbuka untuk pemuda-pemudi dari semua kalangan dan beragam latar belakang untuk berhimpun dan bergerak dalam merestorasi Indonesia. Organisasi ini memiliki satuan reaksi cepat yang dilatih secara semi-militer dengan tujuan bela negara. Satuan itu dinamakan Barisan Reaksi Cepat (BARET) yang dipimpin oleh seorang komandan berkedudukan setingkat Ketua Bidang di bawah Ketua Umum sebagai pemimpin tertinggi. Saat ini, komandan baret di tingkat nasional adalah Muhammad Gofar. Dalam perekrutannya, Partai NasDem juga melakukan beberapa model kaderisasi dengan tetap menjunjung nilai-nilai ideologi Pancasila. Dalam perekrutannya, GP NasDem menggunakan model kaderisasi terbuka, non diskriminatif, serta berjenjang. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- a. Model Kaderisasi Terbuka. Berdasarkan model kaderisasi terbuka, Partai NasDem melakukan model kaderisasi terbuka, dalam perekrutan kader maupun anggota sayap partai. Partai NasDem berupaya menciptakan calon pemimpin dengan mempersiapkan kader-kader muda.
- b. Model Kaderisasi Non-Diskriminatif. Berdasarkan model kaderisasi non-Diskriminatif, Partai NasDem berpegang teguh pada norma non-diskriminasi dalam perekrutan kader

maupun anggota sayap partai, karena setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, memiliki hak untuk berpolitik.

- c. Model Kaderisasi Berjenjang. Berdasarkan model kaderisasi berjenjang, Partai NasDem telah mengembangkan model kaderisasi berjenjang berupa pemberian materi kepada para anggota Kaderisasi dalam lingkup kabupaten atau kota yang dilakukan DPC yaitu kaderisasi tingkat Pertama, di tingkat provinsi yaitu DPW dilakukan kaderisasi tingkat Madya, dan pada tingkat paling atas dilakukan kaderisasi tingkat Utama yang dilakukan oleh DPP pada tingkat nasional.

Garuda Keadilan

Partai Keadilan Sejahtera dengan Garuda Keadilan (GK) adalah salah satu sayap muda PKS yang sebagian besarnya merupakan putra-putri Kader PKS. GK mempunyai inisiatif untuk merangkul semua pemuda Islam Indonesia yang ingin memberikan kontribusinya bagi perbaikan negeri ini. GK diharapkan bisa menjadi wadah nongkrongnya para pemuda sehingga merasa nyaman dan mau menyumbangkan potensi yang dimiliki di manapun mereka berada.

Adapun keanggotaan GK dirintis oleh anak kader PKS dari usia SMA hingga mahasiswa. Sampai saat ini keanggotaannya sudah menyebar di beberapa daerah di Nusantara, meliputi: Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Bekasi, Jogjakarta, Jawa Tengah, Lampung, Palembang, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

GK diharapkan bisa menghimpun para pemuda menjadi tempat alternatif untuk melakukan hal-hal positif. Visinya membangun komunikasi yang efektif, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas akhlak, mengembangkan potensi serta mewadahi dan menyalurkan bakat anggotanya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganut sistem tertutup /diskriminatif, dan sistem berjenjang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Model Kaderisasi tertutup/diskriminatif. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganut sistem tertutup /diskriminatif, partai ini merekrut calon-calon anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
- b. Model Kaderisasi Berjenjang. Pada PKS jenjang keanggotaan PKS terdiri dari anggota pendukung dan anggota inti. Setiap anggota sebagaimana kebijakan partai mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam training (pelatihan). Program pelatihan yang dilakukan partai untuk training pengkaderan yang disebut dengan Tarbiyah Tsagiffiyah.

Pada dasarnya, kaderisasi organisasi sayap partai ini memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya manusia. Dari kedua partai Gerindra dan NasDem Sumber daya manusia menjadi kelemahan terdepan yang perlu diperhatikan lain hal nya dengan partai PKS yang memiliki penyeleksian yang ketat tentu lebih memiliki sumber daya manusia yang lebih baik.
- b. Kondisi Keuangan Partai. Dana Partai yang dibiayai oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 25 persen untuk administrasi dan 75 untuk rekrutmen dan tata kelola parpol. Dengan demikian, artinya dana parpol tersebut dibatasi, sehingga parpol harus selektif dalam melakukan kegiatan politik.
- c. Kultur Partai Politik. Partai Gerindra dan NasDem mengedepankan nilai nilai nasionalis yang berorientasi pada pembangunan dan kemajuan negara sedangkan PKS lebih mengedepankan nilai islami demi terciptanya masyarakat yang harmonis.

Model kaderisasi pada Partai Gerindra dan NasDem menggunakan model kaderisasi terbuka dikarenakan kedua partai tersebut dapat menerima seorang kader tanpa ada kriteria kriteria tertentu, tidak tertutup/diskriminatif dari latar belakang apa saja dapat menjadi kader partai. Dan dalam pengkaderan melalui tahapan berjenjang setiap anggota partai yang akan dijadikan kader harus melalui beberapa tahapan pengkaderan.

Hal tersebut sedikit berbeda dengan model kaderisasi pada PKS, karena partai tersebut merupakan partai yang mengusung nilai-nilai Islami yang dikembangkan melalui dakwah. PKS tidak menganut sistem terbuka melainkan tertutup/diskriminatif, partai ini merekrut calon-calon

anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami. PKS juga menggunakan pengkaderan berjenjang dengan melakukan pengkaderan melalui beberapa tahap.

Kelebihan dan Kelemahan pada model kaderisasi sayap partai dari segi sumber daya manusia, pemberdayaan organisasi sayap partai politik, menjadi keharusan karena dari situlah seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Dari segi keuangan partai, partai hanya bergantung pada dana kas anggota dan pemerintah, sehingga terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan dari segi kultur partai politik, ketiga partai yang menjadi fokus dalam penelitian memiliki kultur yang dinamis dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sehingga proses rekrutmen kader dan anggota sayap partai akan mempengaruhi elektabilitas partai politik menjadi semakin baik.

PENUTUP

Perkutan anggota sayap partai yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan NasDem menggunakan model kaderisasi terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang. Hal tersebut sedikit berbeda dengan model kaderisasi pada PKS, karena partai tersebut merupakan partai yang mengusung nilai-nilai Islami yang dikembangkan melalui dakwah. PKS tidak menganut sistem terbuka melainkan tertutup/diskriminatif, partai ini merekrut calon-calon anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung : Gramedia Pustaka
- Firmanzah. (2008). *Memahami Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subiyanto, I. (2014). *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Syamsudin. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik